



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN ANGGARAN 015 (AUDITED)

TAHUN ANGGARAN 2017



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.


Badan Kebijakan Fiskal adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Bagian Anggaran 015 (*Audited*) Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Kebijakan Fiskal. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sebagai usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, April 2018
Plh. Kepala Badan,



♀ Askolani
NIP 19660611 199202 1 001 

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Lampiran	vi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1. Profil Dan Kebijakan Teknis Badan Kebijakan Fiskal	8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3. Basis Akuntansi	11
A.4. Dasar Pengukuran	11
A.5. Kebijakan Akuntansi	12
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan	20
B.2. Belanja	21
B.3. Catatan Penting Lainnya	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
C.1. Aset Lancar	28
C.2. Aset Tetap	29
C.3. Aset Lainnya	35
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	37
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
D.1. Beban Operasional	38
D.2. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	42
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
E.1. Ekuitas Awal	43
E.2. Surplus (Defisit) LO	43
E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	43
E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	43
E.5. Transaksi Antar Entitas	44
E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	45
E.3. Ekuitas Akhir	45
F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	46
F.1. Tuntutan Ganti Rugi	46



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO LANTAI 3 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203; FAKSIMILE (021) 3812763; WEBSITE www.fiskal.depkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bagian Anggaran 015 (*Audited*) Tahun Anggaran 2017 Badan Kebijakan Fiskal yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, April 2018
Plh. Kepala Badan

♀ Askolani
NIP 19660611 199202 1 001~~RE~~

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
1.	Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2017 dan 2016	1
2.	Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2017 dan 2016	2
3.	Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang	17
4.	Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
5.	Tabel 5 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP	20
6.	Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBP Per 31 Desember 2017 dan 2016	20
7.	Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja menurut Kegiatan Tahun Anggaran 2017	21
8.	Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017	21
9.	Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017	22
10.	Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016	23
11.	Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2017 dan 2016	23
12.	Tabel 12 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2017 dan 2016	24
13.	Tabel 13 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2017 dan 2016	28
14.	Tabel 14 Rincian Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 2016	29
15.	Tabel 15 Rincian Aset Tetap Per 31 Desember 2017 dan 2016	29
16.	Tabel 16 Rincian Tanah Per 31 Desember 2017 dan 2016	30
17.	Tabel 17 Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2017	30

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
18.	Tabel 18 Rincian Penambahan Nilai Tanah Hasil Revaluasi Per 31 Desember 2017	31
19.	Tabel 19 Rincian Gedung dan Bangunan Hasil Revaluasi Per 31 Desember 2017	33
20.	Tabel 20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2017	35
21.	Tabel 21 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2017 dan 2016	35
22.	Tabel 22 Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2017	36
23.	Tabel 23 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2017	37
24.	Tabel 24 Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2017 dan 2016	38
25.	Tabel 25 Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2017 dan 2016	39
26.	Tabel 26 Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2017 dan 2016	39
27.	Tabel 27 Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2017 dan 2016	40
28.	Tabel 28 Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2017 dan 2016	40
29.	Tabel 29 Rincian Beban Penyusutan dan Per 31 Desember 2017 dan 2016	41
30.	Tabel 30 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2017 dan 2016	41
31.	Tabel 31 Rincian Surplus/Defisit Per 31 Desember 2017 dan 2016	42
32.	Tabel 32 Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 31 Desember 2017	44
33.	Tabel 33 Rincian Koreksi Aset Non Revaluasi Per 31 Desember 2017	44

DAFTAR GRAFIK

No		Halaman
1.	Grafik 1 Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Neraca
7. Neraca Percobaan
8. Memo Penyesuaian
9. Kertas Kerja Telaah
10. Surat Ijin Pembukaan Rekening
11. Berita Acara Pemeriksaan Realisasi Anggaran antara BKF dengan KPPN Jakarta II
12. Rekening Koran Per 31 Desember 2017
13. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
14. Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran
15. Berita Acara Rekonsiliasi BMN
16. Laporan Posisi BMN di Neraca
17. Laporan Persediaan
18. Laporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Intrakomptabel TA 2017
19. Laporan Pengguna Eselon I Ekstrakomptabel TA 2017
20. Laporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel TA 2017
21. Laporan Barang Pengguna Eselon I Aset Tak Berwujud TA 2017
22. Matrik Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.850.146.888. Pada Tahun Anggaran 2017 Badan Kebijakan Fiskal tidak memiliki estimasi pendapatan.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp132.149.519.886. atau mencapai 84,56 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp156.276.761.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017			31 DES 2016
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Negara		1.850.146.888	-	377.063.733
Belanja Negara	156.276.761.000	132.149.519.886	84,56	210.816.024.205

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp33.518.699.011, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.059.172.408, Aset Tetap sebesar Rp29.321.589.853 dan Aset Lainnya sebesar Rp137.936.750.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.867.175.433 dan Rp30.651.523.578.

Tabel 2
Ringkasan Neraca
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/(Turun)	%
Aset				
Aset Lancar	4.059.172.408	22.308.778.828	(18.249.606.420)	(81,80)
Aset Tetap	29.321.589.853	16.955.127.251	12.366.462.602	72,94
Aset Lainnya	137.936.750	710.444.370	(572.507.620)	(80,58)
Jumlah Aset	33.518.699.011	39.974.350.449	(6.455.651.438)	(16,15)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	2.867.175.433	21.539.532.565	(18.672.357.132)	(86,69)
Jumlah Kewajiban	2.867.175.433	21.539.532.565	(18.672.357.132)	(86,69)
Ekuitas				
Ekuitas	30.651.523.578	18.434.817.884	12.216.705.694	66,27
Jumlah Ekuitas	30.651.523.578	18.434.817.884	12.216.705.694	66,27
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	33.518.699.011	39.974.350.449	(6.455.651.438)	(16,15)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. Beban surplus/defisit dari operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp0 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp133.278.748.596. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar surplus Rp1.467.080.420 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp131.811.668.176.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp18.434.817.884 ditambah Defisit-LO sebesar Rp131.811.668.176, kemudian transaksi antar entitas senilai Rp142.175.663.815, sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp30.651.523.578.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 31 Desember 2017, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

Uraian	Catatan	31 DES 2017			31 DES 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	1.850.146.888		377.063.733
Jumlah Pendapatan		-	1.850.146.888	-	377.063.733
BELANJA	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1	34.639.200.000	33.313.923.286	96,17	33.321.313.668
2. Belanja Barang	B.2.2	103.716.841.000	82.568.813.605	79,61	172.120.764.605
3. Belanja Modal	B.2.3	17.920.720.000	16.266.782.995	90,77	5.373.945.932
Jumlah Belanja		156.276.761.000	132.149.519.886	84,56	210.816.024.205

II. NERACA

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016**

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
ASET			
Aset Lancar			
	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	3.002.038.903	21.514.078.566
Piutang Bukan Pajak	C.1.2	17.990.765	26.986.122
Persediaan	C.1.3	1.039.142.740	767.714.140
Jumlah Aset Lancar		4.059.172.408	22.308.778.828
Aset Tetap			
	C.2		
Tanah	C.2.1	2.598.368.000	722.145.132
Peralatan dan Mesin	C.2.2	90.258.600.917	63.038.441.081
Gedung dan Bangunan	C.2.3	2.959.470.000	2.645.556.040
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4	1.257.708.832	168.616.495
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	484.966.089	424.977.589
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(68.237.523.985)	(50.044.609.086)
Jumlah Aset Tetap		29.321.589.853	16.955.127.251
Aset Lainnya			
	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	931.221.500	2.360.930.080
Aset Lain-Lain	C.3.2	1.667.505.000	2.466.950.000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(2.460.789.750)	(4.117.435.710)
Jumlah Aset Lainnya		137.936.750	710.444.370
JUMLAH ASET		33.518.699.011	39.974.350.449
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	2.867.175.433	21.539.532.565
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.867.175.433	21.539.532.565
JUMLAH KEWAJIBAN		2.867.175.433	21.539.532.565
EKUITAS			
	C.5		
Ekuitas		30.651.523.578	18.434.817.884
JUMLAH EKUITAS		30.651.523.578	18.434.817.884
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		33.518.699.011	39.974.350.449

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional	D.1		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	0	0
Jumlah Pendapatan Operasional		0	0
Beban Operasional	D.2		
Beban Pegawai	D.2.1	33.317.967.100	33.320.250.860
Beban Persediaan	D.2.2	2.386.973.846	2.112.691.096
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	42.493.593.771	178.911.911.796
Beban Pemeliharaan	D.2.4	5.355.309.016	4.315.833.116
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	41.123.365.298	27.986.162.640
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	8.601.584.768	6.667.584.994
Beban Penyusutan Piutang tak Tertagih	D.2.7	(45.203)	(45.204)
Jumlah Beban Operasional		133.278.748.596	253.314.389.298
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(133.278.748.596)	(253.314.389.298)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.3		
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Operasional	D.3.1		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.171.566.561	53.500.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		423.635.683	3.850.000
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		747.930.878	49.650.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.3.2		
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		726.068.966	591.196.102
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		6.919.424	50.842.750
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		719.149.542	540.353.352
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		1.467.080.420	590.003.352
SURPLUS / (DEFISIT) - LO		(131.811.668.176)	(252.724.385.946)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN KEBIJAKAN FISKAL LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2017	31 DES 2016
EKUITAS AWAL	E.1	18.434.817.884	29.248.235.945
SURPLUS/DEFISIT - LO	E.2	(131.811.668.176)	(252.724.385.946)
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN	E.3	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET		0	0
PENYESUAIAN NILAI KEWAJIBAN		0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	1.852.710.055	(2.205.805.646)
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.1	1.852.710.055	0
KOREKSI NILAI ASEPT TETAP NON REVALUASI	E.4.2	0	(2.205.805.646)
LAIN-LAIN		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	142.275.357.815	244.116.773.531
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	12.216.705.694	(10.813.418.061)
EKUITAS AKHIR	E.7	30.651.523.578	18.434.817.884

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN KEBIJAKAN FISKAL

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) adalah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang pembentukannya dimaksudkan untuk membantu Menteri Keuangan dalam merumuskan kebijakan fiskal secara langsung maupun kebijakan ekonomi yang terkait dengan fiskal dalam rangka menciptakan kondisi fiskal yang berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi kebijakan ekonomi makro, kebijakan APBN, kebijakan pendapatan negara yang meliputi kebijakan pajak, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan, dan cukai serta kebijakan sektor keuangan. Selain itu, mengingat keberhasilan kebijakan ekonomi nasional juga sangat ditentukan oleh dukungan lingkungan eksternal, BKF juga menjalankan fungsi kerjasama kebijakan kerjasama internasional, baik di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Mengingat lingkup tugas perumusan kebijakan yang bersifat nasional, BKF melakukan koordinasi intensif dengan unit-unit eselon I di dalam Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lain yang terkait, seperti Bank Indonesia, Bappenas, dan Kementerian sektoral lainnya. Kerjasama dan koordinasi intensif yang mempunyai dampak kebijakan fiskal tersebut harus dapat dijaga sustainabilitasnya, dan di sisi lain mempunyai kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pembangunan yang berkualitas, yang mencakup antara lain dukungan terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Kondisi perekonomian nasional dan dukungan kebijakan fiskal yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir mendorong kepada transformasi organisasi BKF agar dapat mempunyai daya dukung yang lebih optimal. Sejak awal pembentukannya tahun 2006 (Peraturan Presiden nomor 66 Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 dengan susunan organisasi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2006), BKF telah mengalami 3 (tiga) kali reorganisasi yang lebih dimaksudkan untuk penajaman berbagai fungsi organisasi sesuai dengan kondisi dinamis dan prioritas arah kebijakan Kementerian Keuangan. Perubahan struktur organisasi BKF terakhir ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat Badan
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
7. Pusat Kebijakan Kerja Sama Regional dan Bilateral

Visi

Visi Kementerian Keuangan adalah menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Yang Inklusif di Abad ke-21.

Untuk mendukung tercapainya visi Kementerian Keuangan tersebut, Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan mempunyai visi: Menjadi menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera.

Yang dimaksud dengan Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal adalah Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan *aplicable* sehingga diakui dan dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya. Antisipatif artinya handal dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan *aplicable* dan dapat menjadi solusi permasalahan yang ada. Responsif, artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

Misi

Untuk mencapai visi menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera, BKF mengemban misi:

1. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.
2. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.

3. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
4. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
5. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi perekonomian nasional.
6. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar, keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
7. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan penganggaran yang suportif.

Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumusan kebijakan fiskal yang dapat dilaksanakan, tepat waktu, dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BKF telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Kebijakan yang Berkualitas
2. Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal
3. Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal yang Efektif
4. Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif
5. Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif
7. Organisasi yang Kondusif
8. Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi
9. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Kebijakan Fiskal. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan Badan Kebijakan Fiskal. Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Kebijakan Fiskal adalah satu satker.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Badan Kebijakan Fiskal menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dasar

Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Kebijakan Fiskal dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang berhak menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Kebijakan Fiskal tidak terdapat pendapatan yang termasuk pendapatan-LO.

Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017

tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilai berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilai selain Tanah.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi hasil perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambahan ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.

Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dan entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih*

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

*Tabel 3
Penggolongan Kualitas Piutang*

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Penyusutan Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4.

*Tabel 4
Pengolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap*

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (alat music Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berkas Akrua
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrua dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintah. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrua. Kedua, Perbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrua pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi
Pendapatan
Rp1.850.146.888

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp1.850.146.888. Dalam DIPA Badan Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2017 tidak memiliki estimasi pendapatan. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah adalah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

Tabel 5
Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

No.	Uraian	Estimasi	Realisasi	% Naik/ (Turun)
1	Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya	0	1.171.566.561	-
2	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0	16.215.156	-
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	0	198.875.361	-
4	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	0	463.489.810	-
	Jumlah	0	1.850.146.888	-

Realisasi PNBP Lainnya Tahun Anggaran 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp1.456.867.999 atau 78,74 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2016. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari Pemindahtangan BMN Lainnya. Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi PNBP
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	Pendapatan dari Pemindahtangan BMN Lainnya	1.171.566.561	53.500.000	1.118.066.561	2089,84
2	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	16.215.156	0	0	100,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	198.875.361	39.720.359	159.155.002	400,69
4	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	463.489.810	283.843.374	179.646.436	63,29
	Jumlah	1.850.146.888	377.063.733	1.456.867.999	78,74

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Rp132.149.519.886 Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Belanja per kegiatan
Tahun Anggaran 2017

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja	%
1740	Perumusan Kebijakan APBN	7.913.694.000	6.183.113.295	78,13
1741	Perumusan Kebijakan Ekonomi	11.625.822.000	10.091.338.040	86,80
1742	Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral	10.750.968.000	9.821.483.667	91,35
1743	Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNPB	12.836.208.000	10.843.499.213	84,48
1744	Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan	7.132.710.000	6.154.252.534	86,28
1745	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal	94.636.456.000	79.709.550.474	84,23
5135	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral	11.380.903.000	9.441.531.059	82,96
Jumlah		156.276.761.000	132.244.768.282	84,62
Pengembalian Belanja			95.248.396	
Belanja Netto		156.276.761.000	132.149.519.886	84,56

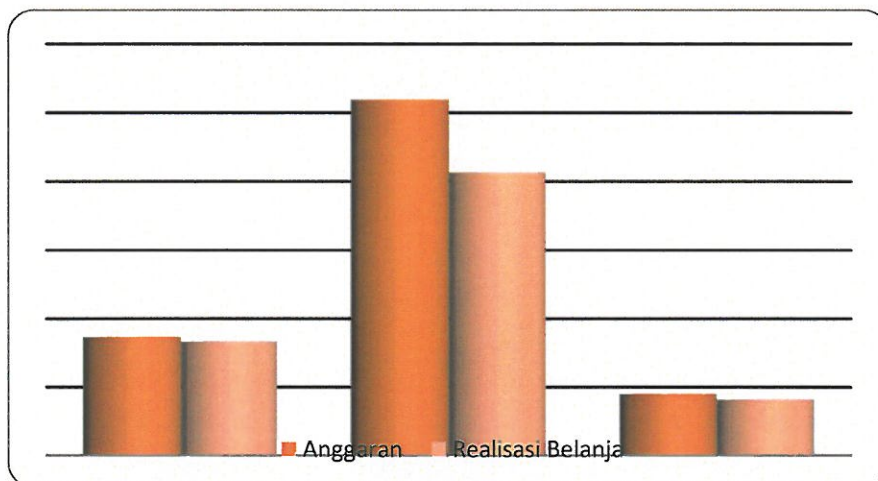
Realisasi belanja Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp132.149.519.886 atau sebesar 84,56 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp95.248.396. Anggaran dan realisasi belanja menurut jenis belanja Tahun Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2017

Kode Jenis Belanja	Uraian	Anggaran	Realisasi Belanja	% Naik / Turun
51	Belanja Pegawai	34.639.200.000	33.313.923.286	96,17
52	Belanja Barang	103.716.841.000	82.568.813.605	79,61
53	Belanja Modal	17.920.720.000	16.266.782.995	90,77
Jumlah		156.276.761.000	132.149.519.886	84,56

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1
Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2017



Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 mengalami penurunan sebesar Rp78.666.504.319 dibandingkan Tahun Anggaran 2016 disebabkan oleh tidak lagi ada kegiatan internasional seperti Sidang Tahunan *Islam Development Bank* yang dilaksanakan pada tahun 2016. Perbandingan realisasi belanja per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 9
Perbandingan realisasi Belanja
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Kode	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik / (Turun)	
		31 DES 2017	31 DES 2016	Rp	%
51	Belanja Pegawai	33.313.923.286	33.321.313.668	(7.390.382)	(0,02)
52	Belanja Barang	82.568.813.605	172.120.764.605	(89.551.951.000)	(52,03)
53	Belanja Modal	16.266.782.995	5.373.945.932	10.892.837.063	202,70
	Jumlah	132.149.519.886	210.816.024.205	(78.666.504.319)	(37,32)

Belanja Pegawai
Rp33.313.923.286

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp33.313.923.286 sedangkan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp33.321.313.668. Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar 0,02 persen.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	23.163.337.900	22.597.681.000	565.656.900	2,50
Belanja Pembulatan Gaji PNS	326.758	292.333	34.425	11,78
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.455.859.000	1.377.775.112	78.083.888	5,67
Belanja Tunj. Anak PNS	401.954.270	386.811.011	15.143.259	3,91
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.668.520.000	1.662.860.000	5.660.000	0,34
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.332.400.000	1.397.120.000	(64.720.000)	(4,63)
Belanja Tunj. PPh PNS	100.293.644	303.400.587	(203.106.943)	(66,94)
Belanja Tunj. Beras PNS	1.163.644.560	1.129.634.620	34.009.940	3,01
Belanja Uang Makan PNS	2.821.278.000	2.904.886.000	(83.608.000)	(2,88)
Belanja Tunj. Umum PNS	703.870.000	730.625.000	(26.755.000)	(3,66)
Belanja Uang Lembur	522.884.000	867.857.000	(344.973.000)	(39,75)
Realisasi Belanja Bruto	33.334.368.132	33.358.942.663	(24.574.531)	(0,07)
Pengembalian Belanja	20.444.846	37.628.995	(17.184.149)	(45,67)
Realisasi Belanja Netto	33.313.923.286	33.321.313.668	(7.390.382)	(0,02)

Belanja Barang
Rp82.568.813.605

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp82.568.813.605 dan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp172.139.764.605. Penurunan realisasi belanja barang sebesar 52,03 persen antara lain disebabkan oleh tidak lagi ada kegiatan internasional seperti Sidang Tahunan *Islam Development Bank* yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	5.537.055.345	4.925.229.933	611.825.412,00	12,42
Belanja Barang Non Operasional	14.732.002.517	14.701.675.383	30.327.134,00	0,21
Belanja Barang Persediaan	2.767.233.735	2.116.512.360	650.721.375,00	-
Belanja Jasa	13.205.172.520	118.245.758.573	(105.040.586.053,00)	(88,83)
Belanja Pemeliharaan	5.156.892.952	4.159.979.716	996.913.236,00	23,96
Belanja Perjalanan Dinas DN	26.667.868.695	16.574.725.243	10.093.143.452,00	60,89
Belanja Perjalanan Dinas LN	14.577.391.391	11.415.883.397	3.161.507.994,00	27,69
Realisasi Belanja Bruto	82.643.617.155	172.139.764.605	(89.496.147.450,00)	(51,99)
Pengembalian Belanja	74.803.550	19.000.000	55.803.550	
Realisasi Belanja Netto	82.568.813.605	172.120.764.605	(89.551.951.000,00)	(52,03)

Belanja Modal
Rp16.266.782.995

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp16.266.782.995 dan Rp5.373.945.932. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 202,70 persen disebabkan oleh pembelian kendaraan operasional yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.385.702.495	1.753.029.232	13.632.673.263	777,66
Belanja Modal Gedung dan Bagunan	721.398.000	198.011.000	523.387.000	264,32
Belanja Modal Lainnya	159.682.500	3.422.905.700	(3.263.223.200)	(95,33)
Realisasi Belanja Bruto	16.266.782.995	5.373.945.932	10.892.837.063	202,70
Pengembalian Belanja	0	0	-	-
Realisasi Belanja Netto	16.266.782.995	5.373.945.932	10.892.837.063	202,70

B.3. Catatan Penting Lainnya

B.3.1 Penerimaan Hibah Luar Negeri BKF

1. Hibah *Technical Assistance* ADB 8858-INO: *Strenghtening Knowledge Sharing in Indonesia*

Dalam rangka meningkatkan kegiatan *knowledge sharing* dalam penyusunan kebijakan di Indonesia, *Asian Development Bank* (ADB) berkomitmen memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai *Executing Agency* dalam bentuk *Technical Assistance* (TA) ADB 8858-INO: *Strenghtening Knowledge Sharing in Indonesia* senilai USD725,000 untuk jangka waktu Desember 2014 hingga Desember 2017.

TA ini bertujuan meningkatkan kapabilitas *knowledge sharing* di Indonesia, dengan menyediakan *responses to just-in-time knowledge request* melalui konsultan ADB dan konsultan yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan dan BAPPENAS. TA ini juga bertujuan mendesiminasi hasil publikasi kebijakan Kementerian Keuangan dan BAPPENAS, termasuk penyelenggaraan seminar/workshop dengan topik yang menjadi *key policy* dan *sector issues*.

Hibah TA ini berlaku efektif di Badan Kebijakan Fiskal sebagai *Implementing Agency* mulai Desember 2015 hingga Desember 2017 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 21SRT4Y3. Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah TA ini sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR dan KPPN sebesar Rp4.153.756.800.

2. Hibah *Technical Assistance* ADB 9054-INO: *Enhancing the Regulatory Framework of Financial Sector Development and Oversight*

ADB memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pengembangan dan pengawasan industri jasa keuangan di

Indonesia. Hibah tersebut diberikan dalam bentuk Technical Assistance ADB 9054-INO: Enhancing the Regulatory Framework of Financial Sector Development and Oversight senilai USD1,500,000. Atas hibah ini, yang bertindak selaku Executing Agency (EA) adalah Kementerian Keuangan c.q. BKF, dan yang bertindak sebagai Implementing Agency (IA) adalah Kementerian Keuangan c.q. BKF bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 17 Februari 2016 dan mempunyai *closing date* tanggal 17 Februari 2018 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2NAXKEJA. Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR dan KPPN sebesar Rp1.107.321.250.

3. Hibah Proyek *Sustainable Development Financing* (SDF)

Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan terkait mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan, serta biodiversity. Selama proyek ini berlangsung telah menghasilkan beberapa output antara lain adalah (i) pengembangan penandaan anggaran (budget tagging) perubahan iklim, (ii) penyusunan pedoman penandaan anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, (iii) penyusunan laporan anggaran mitigasi perubahan iklim tahun anggaran 2016 dan 2017, (iv) pelaksanaan rekonsiliasi dan pendampingan teknis dalam pelaksanaan penandaan anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tingkat nasional dengan lintas kementerian, (v) penyusunan naskah akademik dan rekomendasi kepada Kemendagri untuk pengembangan sistem penandaan anggaran untuk kegiatan perubahan iklim tingkat daerah, (vi) pelaksanaan penerapan penganggaran berbasis kinerja di Indonesia, dan (vii) penyusunan analisis Climate Public Expenditure and Institutional Review (CPEIR) di level provinsi dengan studi kasus di 5 daerah yaitu Jawa Tengah, Jambi, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung.

Proyek akan dilaksanakan di bawah tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dengan anggaran sebesar USD620,000 untuk periode September 2014 – Agustus 2017 yang berasal dari UNDP serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2Q36JPE4. Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR dan KPPN sebesar Rp5.123.793.945.

4. Hibah Program *Biodiversity Finance Initiative* (BIOFIN)

BIOFIN merupakan upaya kemitraan global untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan keanekaragaman hayati. Inisiatif ini merupakan platform multi-stakeholders yang melibatkan lintas kementerian. Di Indonesia, Kementerian Keuangan, dalam hal ini Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, menjadi *leading* unit untuk kegiatan-kegiatan BIOFIN. Beberapa hasil perkembangan yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama kementerian teknis lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Komponen 1 mengenai analisa terhadap kebijakan, kelembagaan, dan pengeluaran publik dan swasta terkait keanekaragaman hayati. Komponen 1 terdiri dari *workbook* 1a dan 1b mengenai reviu kelembagaan dan kebijakan keanekaragaman hayati dan *workbook* 1c mengenai reviu belanja kehati. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dibantu dengan konsultan telah menyelesaikan *workbook* 1a dan 1b, tetapi belum dilakukan sosialisasi final kepada beberapa kementerian teknis terkait. Untuk *workbook* 1c, Kementerian Keuangan telah menyelesaikan dokumen dimaksud dan telah melakukan sosialisasi ke beberapa kementerian teknis terkait.
- b. Komponen 2 mengenai analisa dan penilaian secara menyeluruh terhadap pendanaan Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman Hayati di Indonesia (*Indonesia Biodiversity Strategic and Action Plan/IBSAP*), kemampuan pendanaan dan sistem pendanaan yang ada saat ini dan kebutuhan di masa datang untuk mencapai Aichi Biodiversity Target. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama konsultan telah melakukan kunjungan lapangan/survei ke beberapa locus yang akan dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penyusunan dokumen dimaksud. Saat ini, dokumen dimaksud sedang dilakukan analisa terakhir, sebelum dilakukan sosialisasi final.
- c. Komponen 3 mengenai pengembangan rencana memobilisasi pendanaan keanekaragaman hayati termasuk analisa aktor, kesempatan, dan mekanisme keuangan yang potensial. Kemenkeu merupakan *lead* dalam penyusunan komponen ini. Saat ini, komponen 3 masih dalam proses analisis.
- d. Komponen 4 mengenai inisiasi implementasi rencana pendanaan keanekaragaman hayati dalam suatu *pilot project*. Untuk komponen ini masih belum dipastikan secara jelas, kementerian/lembaga (K/L) yang akan menjadi koordinator dalam penyusunan komponen ini.

Hibah ini diberikan oleh UNDP dengan nilai komitmen sebesar USD1.000.000 untuk periode November 2013 – November 2018 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 226EDYDA.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR dan KPPN sebesar Rp3.579.662.905.

5. Hibah Proyek *Study and Experts Fund – Subsidy Reform*

Pemerintah German melalui *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) memberikan hibah jasa kepada pemerintah Indonesia dalam proyek skema subsidi untuk pupuk dan beras, yang ditargetkan kepada orang miskin dan yang mencakup prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Dalam Proyek hibah jasa ini, GIZ berkontribusi menyediakan expertis, memasok bahan dan peralatan, operasional dan biaya administrasi. Kontribusi hibah tersebut senilai EUR250,000 untuk periode Februari 2016 – Maret 2017 serta telah mendapat register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan nomor register 23H15VSG. Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR dan KPPN sebesar Rp2.752.280.489.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar
Rp4.059.172.408

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp4.059.172.408 dan Rp22.308.778.828. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2017 dan 2016 dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 13
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Aset Lancar	31 DES 2017	31 DES 2016
1	Kas Lainnya dan Setara Kas	3.002.038.903	21.514.078.566
2	Piutang Bukan Pajak	17.990.765	26.986.122
3	Persediaan	1.039.142.740	767.714.140
	Jumlah	4.059.172.408	22.308.778.828

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp3.002.038.903

C.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp3.002.038.903 dan Rp21.514.078.566 yang merupakan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Jumlah tersebut berasal dari transaksi LS Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) kepada Bendahara Pengeluaran dan sisa dana hibah ADB TA 8858-INO. Sisa dana hibah tersebut sebesar Rp133.700.000 untuk pembayaran kepada pihak ketiga dan Rp146.421.238 disetorkan kembali ke kas negara.

Piutang Bukan
Pajak
Rp17.990.765

C.1.3. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan pajak per tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp17.990.165 dan Rp26.986.122. Adapun nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang PNBPN adalah sebesar (Rp90.405). Piutang PNBPN merupakan jumlah penerimaan Negara bukan pajak yang terutang ditentukan dengan cara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah dan dihitung sendiri oleh wajib pajak. Penetapan jumlah PNBPN yang terutang oleh instansi pemerintah kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya PNBPN.

Persediaan

Rp1.039.142.740

C.1.4. Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp1.039.142.740 dan Rp767.714.140. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016
1	Barang Konsumsi	1.008.457.712	742.577.600
2	Barang untuk Pemeliharaan	30.685.028	25.136.540
Jumlah		1.039.142.740	767.714.140

Semua jenis persediaan pada tanggal tersebut berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Rp29.321.589.853

C.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp29.321.589.853 dan Rp16.955.127.251 yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian aset tetap Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Rincian Aset Tetap
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016
1	Tanah	2.598.368.000	722.145.132
2	Peralatan dan Mesin	90.258.600.917	63.038.441.081
3	Gedung dan Bangunan	2.959.470.000	2.645.556.040
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1.257.708.832	168.616.495
5	Aset Tetap Lainnya	484.966.089	424.977.589
Jumlah		97.559.113.838	66.999.736.337
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		(68.237.523.985)	(50.044.609.086)
Nilai Buku Aset Tetap		29.321.589.853	16.955.127.251

Tanah

Rp2.598.368.000

C.2.1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Kebijakan Fiskal per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.598.368.000 dan Rp722.145.132.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan pada tabel berikut:

*Tabel 16
Rincian Tanah
Per 31 Desember 2017 dan 2016*

No.	Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016
1	Tanah Persil	2.510.091.000	696.283.186
2	Lapangan	88.277.000	25.861.946
Jumlah		2.598.368.000	722.145.132

*Tabel 17
Rincian Saldo Tanah
Per 31 Desember 2017*

No.	Kode Barang	Lokasi	Luas m2	Nilai
1	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	290	2.204.518.000
2	2010102014	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	45	305.573.000
3	2010307009	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	13	88.277.000
Jumlah			348	2.598.368.000

Perubahan nilai buku tanah milik BKF merupakan hasil koreksi dari kegiatan inventarisasi dan penilaian oleh tim penilai DJKN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Nilai tanah milik BKF berdasarkan hasil penilaian mengalami penambahan dengan detail sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2016	Rp.	722.145.132
Mutasi tambah:		
- Pembelian	Rp.	0
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)	Rp.	1.876.222.868
Mutasi Kurang:		
- Penjualan	Rp.	0
Saldo Per 31 Desember 2017	Rp.	2.598.368.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp.	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	Rp.	2.598.368.000

Saldo Tanah milik BKF per 31 September 2017 seluas 348 m² / Rp2.598.368.000 terdiri dari 2 kelompok, yaitu Tanah Persil dan Lapangan.

Tanah persil sendiri terdiri dari 2 sub kelompok, yaitu Tanah Bangunan Gudang seluas 290 m² / Rp2.204.518.000. yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi digunakan sebagai gedung Arsip BKF dan Tanah Bangunan Garasi/Pool seluas 45 m² / Rp305.573.000 yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi dihuni oleh Saudara Hardi berdasarkan Surat Sekretaris BKF No. S-226/KF.1/2008 tanggal 5 September 2008. Terdapat koreksi luas tanah pada aset tanah bangunan garasi sebesar 15 m² setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penyesuaian sertifikat tanah.

Sedangkan untuk kelompok Lapangan terdiri dari 1 sub-sub kelompok yaitu Tanah untuk Jalan Khusus/Komplek seluas 13 m² / Rp88.277.000 yang berlokasi di Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.

Rincian Penambahan Nilai Tanah Hasil Revaluasi per 31 Desember 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Rincian Penambahan Nilai Tanah Hasil Revaluasi
Per 31 Desember 2017

No.	Kode Barang	Lokasi	Luas m ²	Penambahan Nilai Hasil Revaluasi
1	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	290	1.627.597.646
2	2010102014	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	45	186.210.168
3	2010307009	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	13	62.415.054
Jumlah			348	1.876.222.868

*Peralatan dan
Mesin
Rp90.258.600.917*

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp90.258.600.917 dan Rp63.038.441.081. Penambahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2016	Rp. 63.038.441.081
Mutasi Tambah:	
- Penambahan Saldo Awal	Rp. 0
- Pembelian	Rp. 15.378.748.295
- Transfer Masuk	Rp. 12.293.145.291
- Hibah Masuk	Rp. 942.266.250
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	Rp. 1.394.000.000
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	Rp. 0
Saldo Per 31 Desember 2017	Rp. 90.258.600.917
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	Rp. 67.687.203.412
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	Rp. 22.571.397.505

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut:

Transaksi Penambahan dari Pembelian

Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	6.864.636.000
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Rp.	19.250.000
Alat Bengkel Tak Bermesin	Rp.	4.950.000
Alat Ukur	Rp.	11.220.000
Alat Kantor	Rp.	1.997.513.000
Alat Rumah Tangga	Rp.	1.248.520.050
Alat Studio	Rp.	334.914.500
Alat Komunikasi	Rp.	52.225.000
Alat Kedokteran	Rp.	14.355.000
Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Rp.	5.830.000
Komputer Unit	Rp.	2.996.245.945
Peralatan Komputer	Rp.	1.829.088.800
Jumlah	Rp.	15.378.748.295

Transaksi Penambahan dari Transfer Masuk

Alat Bantu	Rp.	2.275.582.828
Alat Kantor	Rp.	2.475.722.593
Alat Rumah Tangga	Rp.	5.944.823.570
Unit Alat Laboratorium	Rp.	12.282.000
Alat Kerja Penerbangan	Rp.	1.267.144.800
Unit Peralatan Proses/Produksi	Rp.	317.589.500
Jumlah	Rp.	12.293.145.291

Transaksi transfer masuk berasal dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan dasar Berita Acara Serah Terima Nomor BA-7/SJ.8/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Transaksi Penambahan dari Hibah Masuk:

Alat Kantor	Rp.	129.252.500
Alat Studio	Rp.	12.812.500
Komputer Unit	Rp.	700.263.750
Peralatan Komputer	Rp.	99.937.500
Jumlah	Rp.	942.266.250

Transaksi hibah masuk berasal dari hibah langsung oleh Asian Development Bank sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hibah Berupa Barang Nomor BAST-1/KF.5/2017 tanggal 23 Maret 2017.

Transaksi Pengurangan dari Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.394.000.000
Jumlah	Rp.	1.394.000.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp2.959.470.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp2.959.470.000 dan Rp2.645.556.040. Mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Per 31 Desember 2016	Rp. 2.645.556.040
Mutasi tambah:	
- Transfer Masuk	Rp. 0
- Pengembangan Nilai Aset	Rp. 721.398.000
Mutasi Kurang:	
- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (205)	Rp. -23.512.813
- Koreksi Semu Hasil Penilaian Kembali (223)	Rp. -383.971.227
Saldo Per 31 Desember 2017	Rp. 2.959.470.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp. 44.692.556
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	Rp. 2.914.777.444

Mutasi tambah nilai buku Gedung dan Bangunan milik BKF terdiri dari pengembangan nilai aset Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen yang berlokasi di Jalan Senjaya Buntu No. 8, Jakarta Selatan.

Mutasi kurang nilai buku Gedung dan Bangunan milik BKF merupakan hasil koreksi dari kegiatan inventarisasi dan penilaian oleh tim penilai DJKN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Nilai Gedung dan Bangunan milik BKF berdasarkan hasil penilaian mengalami perubahan dengan detail sebagai berikut:

Tabel 19
Rincian Gedung dan Bangunan Hasil Revaluasi
Per 31 Desember 2017

No.	Kode Barang	Lokasi	Perubahan Nilai Hasil Revaluasi
1	4010102001	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	(496.533.428)
2	4010114001	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	49.292.556
3	4010201001	Jalan Senjaya Buntu No. 8, Jakarta Selatan	240.848.206
4	4010202004	Jalan Sakti IV No. 10 Kemanggisan, Jakarta Pusat	182.879.853
Jumlah			(23.512.813)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan

Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp1.257.708.832

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.257.708.832 dan Rp168.616.495. Nilai buku jalan, irigasi, dan jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp752.080.815 yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp505.628.017.

Saldo per 31 Desember 2016	Rp. 168.616.495
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp. -
- Transfer Masuk	Rp. 1.089.092.337
Mutasi kurang:	
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp. -
- Reklasifikasi Keluar	Rp. -
- Transfer Keluar	Rp. -
Saldo Per 31 Desember 2017	Rp. 1.257.708.832
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp. 505.628.017
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	Rp. 752.080.815

Transaksi transfer masuk berasal dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan dasar Berita Acara Serah Terima Nomor BA-7/SJ.8/2017 tanggal 28 Februari 2017.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp484.966.089

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp484.966.089 dan Rp424.977.589 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo per 31 Desember 2016	Rp. 424.977.589
Mutasi tambah:	
- Pembelian	Rp. 59.988.500
- Transfer Masuk	Rp. -
Mutasi kurang:	
- Koreksi pencatatan nilai/kuantitas	Rp. -
- Reklasifikasi Keluar	Rp. -
- Transfer Keluar	Rp. -
Saldo Per 31 Desember 2017	Rp. 484.966.089
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2017	Rp. -
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	Rp. 484.966.089

Transaksi mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya sebagai berikut:

Transaksi Penambahan dari Pembelian

Bahan Perpustakaan Tercetak	Rp.	59.988.500
Jumlah	Rp.	59.988.500

Pembelian Aset Tetap Lainnya sebesar Rp59.988.500 dari pembelian Bahan Perpustakaan tercetak pada 08 Juni 2017 dan 08 Desember 2017.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akm. Penyusutan
Aset Tetap
Rp68.237.523.985.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah Rp68.237.523.985.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 tersaji pada Tabel 20.

Tabel 20
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	90.258.600.917	67.687.203.412	22.571.397.505
2	Gedung dan Bangunan	2.959.470.000	44.692.556	2.914.777.444
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.257.708.832	505.628.017	752.080.815
4	Aset Tetap Lainnya	484.966.089	-	484.966.089
Akumulasi Penyusutan		94.960.745.838	68.237.523.985	26.723.221.853

Aset Lainnya
Rp2.598.726.500

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.598.726.500 dan Rp4.827.880.080 yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri dari:

Tabel 21
Rincian Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017 dan 2016

No.	Uraian	30 SEPT 2017	31 DES 2016
1	Aset Tak Berwujud	931.221.500	2.360.930.080
2	Aset Lain-Lain	1.667.505.000	2.466.950.000
Jumlah		2.598.726.500	4.827.880.080
Akumulasi Penyusutan		2.460.789.750	4.117.435.710
Nilai Buku		137.936.750	710.444.370

Aset Tak Berwujud
Rp931.221.500

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp931.221.500 dan Rp2.360.930.080. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Kebijakan Fiskal berupa *software* komputer yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Adapun rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 22
Rincian Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2017

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	931.221.500
	Jumlah	931.221.500

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp. 2.360.930.080
Mutasi tambah:	
Mutasi kurang:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain	Rp. -1.429.708.580
Nilai perolehan per 31 Desember 2017	Rp. 931.221.500
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017	Rp. 793.284.750
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp. 137.936.750

Aset Lain-Lain
Rp1.667.505.000

C.3.2. Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.667.505.000. dan Rp2.466.950.000. Aset lain-lain adalah Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Kebijakan Fiskal.

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	Rp. 2.466.950.000
Mutasi tambah:	
- Reklasifikasi dari aset tetap ke aset lain	Rp. 2.823.708.580
Mutasi kurang:	
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	Rp. -3.623.153.580
Nilai perolehan per 31 Desember 2017	Rp. 1.667.505.000
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017	Rp. 1.667.505.000
Nilai Buku per 31 Desember 2017	Rp. 0

Transaksi penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lain

Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	1.394.000.000
Software	Rp.	1.090.222.897
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp.	339.485.683
Jumlah	Rp.	2.823.708.580

Transaksi pengurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelola

Alat Angkutan Darat Bermotor	Rp.	2.665.950.000
Software	Rp.	617.717.897
Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp.	339.485.683
Jumlah	Rp.	3.623.153.580

C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akm. Penyusutan
Aset lainnya
Rp2.460.789.750.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 adalah Rp2.460.189.750.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Tabel 23
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Per 31 Desember 2017

No.	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	931.221.500	793.284.750	137.936.750
2	Aset Lain-Lain	1.667.505.000	1.667.505.000	-
Akumulasi Penyusutan		2.598.726.500	2.460.789.750	137.936.750

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Utang kepada
Pihak ketiga

Rp2.867.175.433

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp2.867.175.433 dan Rp21.539.532.565. Jumlah tersebut berasal dari transaksi LS Bendahara yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui aplikasi Sistem Laporan Bendahara Instansi (SILABI) kepada Bendahara Pengeluaran, belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar dan pembayaran kepada pihak ketiga untuk kegiatan hibah ADB TA 8858.

D. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Operasional
Rp133.278.748.596

D.1. BEBAN OPERASIONAL

Nilai Beban Operasional per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp133.278.748.596 dan Rp253.314.389.298.

Beban Pegawai
Rp33.317.967.100

D.1.1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp33.317.967.100 dan Rp33.320.250.860. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian beban pegawai untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Beban Pegawai
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	23.167.425.500	22.601.574.400	565.851.100	2,50
Belanja Pembulatan Gaji PNS	326.704	292.387	34.317	11,74
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.455.879.430	1.377.895.092	77.984.338	5,66
Belanja Tunj. Anak PNS	401.979.458	386.845.279	15.134.179	3,91
Belanja Tunj. Struktural PNS	1.668.520.000	1.660.870.000	7.650.000	0,46
Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.332.400.000	1.395.820.000	(63.420.000)	(4,54)
Belanja Tunj. PPh PNS	100.394.294	301.390.077	(200.995.783)	(66,69)
Belanja Tunj. Beras PNS	1.163.644.560	1.129.634.620	34.009.940	3,01
Belanja Uang Makan PNS	2.821.278.000	2.904.886.000	(83.608.000)	(2,88)
Belanja Tunj. Umum PNS	703.680.000	730.815.000	(27.135.000)	(3,71)
Belanja Uang Lembur	522.884.000	867.857.000	(344.973.000)	(39,75)
Realisasi Belanja Bruto	33.338.411.946	33.357.879.855	(19.467.909)	(0,06)
Pengembalian Belanja	20.444.846	37.628.995	(17.184.149)	(45,67)
Realisasi Belanja Netto	33.317.967.100	33.320.250.860	(2.283.760)	(0,01)

Beban Persediaan
Rp2.386.973.846

D.1.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.386.973.846 dan Rp2.112.691.096. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 25
Rincian Beban Persediaan
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	2.386.973.846	2.112.691.096	274.282.750	12,98
Realisasi Belanja Netto	2.386.973.846	2.112.691.096	274.282.750	12,98

*Beban Barang dan
Jasa*
Rp42.493.593.771

D.1.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp42.493.593.771 dan Rp178.911.911.796. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian beban jasa untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 26
Rincian Beban Barang dan Jasa
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	3.742.623.048	3.367.848.889	374.774.159	11,13
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	25.945.300	23.084.030	2.861.270	12,40
Beban Honor Operasional Satuan kerja	1.165.270.000	868.570.000	296.700.000	34,16
Beban Barang Operasional Lainnya	603.216.997	665.727.014	(62.510.017)	(9,39)
Beban Bahan	6.359.818.738	6.579.754.177	(219.935.439)	(3,34)
Beban Honor Output Kegiatan	6.129.248.500	6.848.673.000	(719.424.500)	(10,50)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	2.172.935.279	1.273.248.206	899.687.073	70,66
Beban Langganan Listrik	17.022.900	9.183.296	7.839.604	85,37
Beban Langganan Telepon	103.798.646	246.651.978	(142.853.332)	(57,92)
Beban Langganan Air	821.000	731.300	89.700	12,27
Beban Jasa Konsultan	219.000.000	477.463.999	(258.463.999)	(54,13)
Beban Sewa	1.813.231.869	1.869.000.351	(55.768.482)	(2,98)
Beban Jasa Profesi	2.791.296.410	2.227.238.912	564.057.498	25,33
Beban Jasa Lainnya	17.371.740.884	154.468.630.644	(137.096.889.760)	(88,75)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	6.954.200	660.000	6.294.200	100,00
Realisasi Belanja Bruto	42.522.923.771	178.926.465.796	(136.403.542.025)	(76,23)
Pengembalian Belanja	29.330.000	14.554.000	14.776.000	101,53
Realisasi Belanja Netto	42.493.593.771	178.911.911.796	(136.418.318.025)	(76,25)

*Beban
Pemeliharaan*
Rp5.355.309.016

D.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp5.355.309.016 dan Rp4.315.833.116. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.077.150.536	505.685.273	571.465.263	53,05
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.759.146.766	2.505.895.058	253.251.708	9,18
Beban Pemeliharaan Jaringan	1.039.043.500	867.060.000	171.983.500	16,55
Beban Pemeliharaan Lainnya	42.625.000	41.923.970	701.030	1,64
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	437.343.214	395.268.815	42.074.399	9,62
Realisasi Belanja Netto	5.355.309.016	4.315.833.116	1.039.475.900	19,41

Beban Perjalanan Dinas
Rp41.123.365.298

D.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp41.123.365.298 dan Rp27.986.162.640. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 28
Rincian Beban Perjalanan Dinas
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	8.361.103.797	6.752.525.252	1.608.578.545	23,82
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.464.272.500	1.049.160.000	415.112.500	39,57
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.622.541.130	6.639.660.786	2.982.880.344	44,93
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7.143.530.030	2.133.379.205	5.010.150.825	234,85
Beban Perjalanan Biasa-Luar Negeri	96.343.415	0	96.343.415	100,00
Beban Perjalanan Lainnya-Luar Negeri	14.481.047.976	11.415.883.397	3.065.164.579	26,85
Realisasi Belanja Bruto	41.168.838.848	27.990.608.640	13.178.230.208	47,08
Pengembalian Belanja	45.473.550	4.446.000	41.027.550	922,80
Realisasi Belanja Netto	41.123.365.298	27.986.162.640	13.137.202.658	46,94

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp8.601.584.768

D.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp8.601.584.768 dan Rp6.667.584.994. Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 29
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
B. Penyusutan Peralatan dan Mesin	8.349.220.545	6.271.664.109	2.077.556.436	33,13
B. Penyusutan Gedung dan Bangunan	74.549.532	57.130.080	17.419.452	30,49
B. Penyusutan Jaringan	28.942.754	9.897.305	19.045.449	192,43
B. Amortisasi Software	148.871.937	328.893.500	(180.021.563)	0,00
Realisasi Belanja Netto	8.601.584.768	6.667.584.994	2.114.021.337	31,71

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Piutang Tak Tertagih
(Rp45.203)

D.1.7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar (Rp.45.203) dan (Rp45.204). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Per 31 Desember 2017 dan 2016 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 30
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
B. Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(45.203)	(45.204)	1	(0,00)
Realisasi Belanja Netto	(45.203)	(45.204)	1	(0,00)

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp1.467.080.420

D.2. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos surplus/Defisit dari kegiatan non operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Surplus/Defisit
Per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	31 DES 2017	31 DES 2016	Naik/ (Turun)	%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.171.566.561	53.500.000	1.118.066.561	95,43
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	423.635.683	3.850.000	419.785.683	99,09
Surplus/ (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar	747.930.878	49.650.000	698.280.878	93,36
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	726.068.966	591.196.102	134.872.864	18,58
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.919.424	50.842.750	(43.923.326)	(634,78)
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	719.149.542	540.353.352	178.796.190	24,86
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.467.080.420	590.003.352	877.077.068	59,78

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

<i>Ekuitas Awal</i> <i>Rp18.434.817.884</i>	E.1. Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp18.434.817.884 dan Rp29.248.235.945.
<i>Surplus(defisit) LO</i> <i>(Rp131.811.668.176)</i>	E.2. Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah defisit sebesar (Rp131.811.668.176) dan (Rp252.724.385.946). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.
<i>Jumlah Penyesuaian</i> <i>Nilai Tahun Berjalan</i> <i>Rp0</i>	E.3. Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Jumlah Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp0 dan Rp0.
<i>Koreksi Yang</i> <i>Menambah/</i> <i>Mengurangi</i> <i>Ekuitas</i> <i>Rp1.852.710.055</i>	E.4. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp1.852.710.055 dan (Rp2.205.805.646). Nilai ini berasal dari Selisih Revaluasi Aset dan Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi.
<i>Selisih Revaluasi</i> <i>Aset</i> <i>Rp1.852.710.055</i>	E.4.1. Selisih Revaluasi Aset Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap, Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.852.710.055 dan Rp0. Selisih Revaluasi Aset tersebut berasal dari penilaian ulang atas tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan jembatan dan bangunan air.

Tabel 32
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap
Per 31 Desember 2017

No.	Kode Barang	Lokasi	Selisih Revaluasi
1	2010102003	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	1.627.597.646
2	2010102014	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	186.210.168
3	2010307009	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	62.415.054
Jumlah Selisih Revaluasi Tanah			1.876.222.868
1	4010102001	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-A1, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	(496.533.428)
2	4010114001	Kayuringin Jaya Kav. No. B-50-306, Bekasi Selatan, Kab. Bekasi.	49.292.556
3	4010201001	Jalan Senjaya Buntu No. 8, Jakarta Selatan	240.848.206
4	4010202004	Jalan Sakti IV No. 10 Kemanggisan, Jakarta Pusat	182.879.853
Jumlah Selisih Revaluasi Gedung dan Bangunan			(23.512.813)
Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap			1.852.710.055

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
Rp0*

E.4.2. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan (Rp2.205.805.646)

Koreksi nilai aset non revaluasi berasal dari koreksi atas transaksi aset tetap non revaluasi dan aset lainnya non revaluasi.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp142.175.663.815*

E.5. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp142.175.663.815 dan Rp244.116.773.531.

*Kenaikan/
Penurunan Ekuitas
Rp12.216.705.694*

E.6. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Jumlah Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp12.216.705.694 dan 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 10.813.418.061.

Ekuitas Akhir

Rp30.651.523.578

E.7. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir merupakan selisih antara Ekuitas Awal (setelah ditambah dengan Surplus/(Defisit) LO) dengan transaksi atas entitas. Jumlah Ekuitas Akhir untuk periode yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 adalah Rp30.651.523.578 dan Rp18.434.817.884.

F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Tuntutan Ganti Rugi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2017 menetapkan kerugaian negara berdasarkan Surat Penetapan Kerugian Negara sebesar Rp16.215.156 a.n. Anis Qomarodin Hamid dan sebesar Rp56.250.000 a.n. Ahmad Bahri Rambe.

Proses Tuntutan Ganti Rugi a.n. Anis Qomarodin Hamid telah diselesaikan melalui pertemuan yang dilakukan pada hari Selasa, 10 Januari 2017 di Ruang Rapat Sumber Daya Manusia. Dalam pertemuan tersebut, yang bersangkutan menyatakan bersedia mengganti nilai kerugian negara yang ditetapkan dengan cara mencicil, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dari yang bersangkutan yang ditandatangani 31 Januari 2017. Hingga 28 Desember 2017 cicilan yang sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp16.215.156, sehingga pertanggal 31 Desember 2017 Tuntutan Ganti Rugi a.n. Anis Qomarodin Hamid sudah lunas.

Proses Tuntutan Ganti Rugi a.n. Ahmad Bahri Rambe hingga saat ini yang bersangkutan belum berhasil dihubungi, baik melalui sambungan telepon ataupun pada alamat yang terdapat pada data pegawai. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal telah mengusulkan penerbitan Surat Penetapan Ganti Rugi melalui surat kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor SR-16/KF.1/2017 tanggal 24 Oktober 2017.



**DRAFT
LAPORAN KEUANGAN
BAGIAN ANGGARAN 015
(AUDITED)**

TAHUN ANGGARAN 2017

**BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN**

JI. DR Wahidin No.1 Jakarta Pusat